

## **PERNYATAAN SIKAP JPIC OFM PAPUA Menanggapi Situasi Kemanusiaan dan Kekerasan di Tanah Papua**

### **Salve!**

Salam damai dalam Kristus,

Dengan hati yang penuh duka dan keprihatinan mendalam, kami, JPIC OFM Papua, menyaksikan kembali rentetan kekerasan yang terus berulang di Tanah Papua. Serangkaian peristiwa penembakan, operasi keamanan yang berdampak pada warga sipil, jatuhnya korban anak-anak, perempuan, pelajar, masyarakat adat, serta ledakan bom di lingkungan rumah ibadah baru-baru ini, tidak hanya berdampak pada melonjaknya gelombang pengungsian, tetapi juga menorehkan luka dan duka yang mendalam. Situasi ini menunjukkan bahwa Papua masih berada dalam lingkaran penderitaan yang belum menemukan jalan damai yang sejati.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keberpihakan Gereja Katolik terhadap martabat manusia, JPIC OFM Papua menaruh perhatian serius terhadap sejumlah peristiwa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir:

#### **1. Tragedi Dogiyai pada 31 Maret–2 April 2026**

Terjadi operasi penyisiran pasca meninggalnya seorang anggota Polsek Moanemani, Bripda Juventus Edowai, akibat penganiayaan oleh orang tak dikenal. Operasi tersebut mengakibatkan delapan warga sipil tertembak, dengan lima orang meninggal dunia dan tiga lainnya luka berat, termasuk anak-anak sekolah dasar serta seorang ibu lanjut usia, Mama Yulita Pigai (80 tahun).

#### **2. Tragedi Puncak pada 13–14 April 2026**

Kontak senjata antara TPNPB dan Satgas TNI di Pogama yang dilanjutkan dengan operasi menggunakan helikopter dan drone bersenjata yang diarahkan ke wilayah pemukiman sipil di Pogama dan Kampung Kembru, telah mengakibatkan sembilan warga meninggal, termasuk seorang anak berusia lima tahun, serta menyebabkan warga mengungsi demi menyelamatkan diri.

#### **3. Kekerasan terhadap Anak, Pelajar, dan Kelompok Rentan**

Dalam beberapa waktu terakhir, anak-anak, pelajar, dan Perempuan semakin berada pada posisi yang rentan di tengah eskalasi konflik di Papua. Pada 5 Mei 2026, seorang pelajar SMA Negeri Kobogma, Mamberamo Tengah, menjadi korban penembakan saat mengikuti pawai kelulusan. Selanjutnya, pada 7 Mei 2026, operasi militer di Kali Kabur, Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, dilaporkan menyebabkan lima warga meninggal dunia, sementara seorang bayi terkena serpihan peluru. Situasi serupa kembali terjadi pada 10 Mei 2026, ketika seorang pelajar SMA di Dogiyai, Nopison Tebay, dilaporkan menjadi korban penembakan.

#### **4. Rumah Doa yang Terluka**

Pada 17 Mei 2026, ledakan bom terjadi di halaman Gereja Stasi Santo Paulus Nabuni Mbamogo, Paroki Santo Misael Bilogai, Dekanat Moni–Puncak Jaya, Keuskupan Timika, Papua Tengah. Ledakan tersebut menyebabkan empat umat mengalami luka akibat serpihan bom, yakni Pit Pogau, Robert Nabelau, Pius Pogau, dan Piter Nabelau.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga telah merampas rasa aman, masa depan, dan hak hidup orang Papua.

Mereka (Anak-anak dan perempuan Papua) adalah wajah-wajah manusia; saudara-saudari kita; citra Allah sendiri yang terluka, yang semestinya hidup dan bertumbuh dalam ruang damai, memperoleh pendidikan yang layak, serta hidup tanpa bayang-bayang kekerasan dan suara senjata.

Atas situasi tersebut, JPIC OFM Papua menyampaikan sikap sebagai berikut:

**1. Menyesalkan dan Mengutuk Segala Bentuk Kekerasan**

Kami menolak segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh kelompok bersenjata maupun aparat keamanan dengan penggunaan kekuatan yang menimbulkan korban sipil. Kehidupan manusia adalah kudus sejak awal penciptaan, sebagaimana tersurat di Alkitab khususnya Kitab Keluaran yang menegaskan: "Jangan membunuh" (Keluaran 20:13). "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." (Yohanes 10:10). Setiap tindakan yang menyebabkan kematian warga sipil, anak-anak, perempuan, orang tua, dan masyarakat tak bersenjata merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia. Karena itu, mewakili Gereja Katolik, kami menolak logika penyelesaian konflik dengan kekerasan yang menjadikan masyarakat sipil sebagai korban militerisasi.

**2. Menyerukan Perlindungan Martabat Manusia sebagai Gambar Allah**

Ajaran Gereja Katolik menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kejadian 1:27). Begitu juga Dokumen Konsili Vatikan II, dalam *Gaudium et Spes* yang mengungkapkan bahwa: "Segala sesuatu yang melawan kehidupan sendiri ... pembunuhan, pemusnahan, kondisi hidup yang tidak manusiawi, semuanya itu merupakan aib." Martabat manusia tidak boleh tunduk pada kepentingan politik, keamanan, ekonomi maupun proyek pembangunan. Pembangunan tanpa penghormatan terhadap hak hidup, hak budaya, dan hak masyarakat adat bukanlah pembangunan yang berpusat pada manusia.

**3. Menolak Militerisasi di Ruang-Ruang Hidup Masyarakat Sipil**

Kehadiran kekuatan bersenjata yang berlebihan di wilayah sipil sejauh ini telah menimbulkan trauma, ketakutan, pengungsian, dan kerentanan baru bagi masyarakat. Dengan merujuk pada Ensiklik *Fratelli Tutti*, Mendiang Paus Francis menegaskan bahwa: "Perang merupakan kegagalan politik dan kemanusiaan... Setiap perang membuat dunia menjadi lebih buruk daripada sebelumnya." Bagi kami, pendekatan keamanan semata tidak akan menyelesaikan akar persoalan Papua. Karena itu, kami menolak praktik militerisme di atas Tanah Papua dalam bentuk apapun.

**4. Menyerukan Penghormatan terhadap Hak Masyarakat Adat Papua**

Peristiwa konflik tanah ulayat dan pembangunan yang mengabaikan persetujuan masyarakat adat Papua yang terjadi selama ini, memperlihatkan adanya ancaman terhadap ruang hidup masyarakat asli. Dalam Ensiklik *Laudato Si'*, Paus Fransiskus juga menegaskan bahwa: "Bagi masyarakat adat, tanah bukanlah komoditas ekonomi, melainkan karunia Allah dan ruang sakral identitas mereka." Berbagai upaya perampasan ruang hidup, eksploitasi sumber daya, dan pengabaian hak adat merupakan bentuk ketidakadilan structural yang patut dilawan. Karena itu, Gereja Katolik mengajak seluruh pihak untuk menaruh rasa hormat terhadap hak ulayat, budaya lokal, dan partisipasi masyarakat dalam menentukan masa depannya sendiri.

## **5. Menyerukan Perlindungan bagi Anak-anak dan Kelompok Rentan**

Konflik bersenjata yang mengorbankan anak-anak dan Perempuan merupakan luka kemanusiaan yang serius. Anak-anak dan Perempuan Papua berhak memperoleh rasa aman dan menjalani kehidupan tanpa suara senjata. Mereka juga patut mendapatkan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang memadai demi menjemput masa depannya. Karena itu, stop menghancurkan masa depan alam dan manusia Papua.

## **6. Meminta Negara Menjamin Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan**

JPIC OFM Papua meminta investigasi independen terhadap seluruh peristiwa yang menyebabkan korban sipil dengan memegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan seperti: mengungkap kebenaran, pemulihan korban, dan adanya tanggung jawab moral maupun materil dari pelaku. Seperti yang tertuang dalam Ensiklik *Pacem in Terris*, perdamaian sejati hanya dibangun di atas: kebenaran, keadilan, kasih, dan kebebasan. Tanpa keadilan, perdamaian hanya menjadi keheningan yang dipaksakan.

### **Ajakan**

Kami juga mengajak seluruh umat Allah untuk memperbanyak doa memohon perdamaian di Papua; membuka ruang solidaritas bagi korban; serta menjadi pembawa damai di tengah masyarakat. Kami percaya bahwa Papua bukan tanah kutukan, melainkan tanah kehidupan. Papua bukan ruang perang yang tak berujung. Papua adalah rumah bersama. Sebagaimana ditegaskan Nabi Yesaya: "Keadilan akan menumbuhkan damai sejahtera." (Yesaya 32:17). Kiranya Tuhan yang adalah sumber damai menyembuhkan luka Papua dan menguatkan semua orang yang berduka.

Damai Kristus beserta kita.

Jayapura, 18 Mei 2026

Hormat kami,  
JPIC OFM Papua